

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggung jawaban, sehingga harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan (Mahmudi, 2016).

Komponen laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas Dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana sebagai auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan pemerintah guna untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki oleh LKPD tersebut. Selain penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, kualitas sistem pengendalian internal, bukti-

bukti yang memadai dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi pertimbangan di dalam pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari BPK. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang Undang No. 15 Tahun, 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) Opini Tidak Wajar (TP), dan (4) Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Menurut (Bastian, 2010) terdapat lima jenis pendapat yang diberikan oleh auditor (1) pendapat wajar tanpa pengecualian, (2) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas, (3) pendapat wajar dengan pengecualian, (4) pendapat tidak wajar, dan (5) pernyataan tidak memberikan pendapat.

Adapun faktor yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan LKPD dibutuhkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SAKD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama karena ketidakseragaman format laporan keuangan dan kemungkinan tingkat kesalahan penyajian laporan keuangan lebih tinggi. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong setiap pemerintah daerah untuk ikut serta memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi menggunakan jaringan internet maupun jaringan intranet untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan untuk menyeragamkan laporan keuangan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemerintah Kota Palembang telah menerapkan sistem digitalisasi dalam semua transaksi untuk mewujudkan transparansi dalam penggunaan APBD, Pemerintah Kota Palembang akan menggunakan sistem digitalisasi dalam semua transaksi, baik belanja maupun pendapatan. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Zulkarnain mengatakan, penggunaan sistem digital itu sesuai, Keppres Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) untuk mendorong penguatan perekonomian nasional dan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 56 Tahun 2021, tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda. Sumber: Beritapagi (<https://beritapagi.co.id2022>).

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu pada objek, populasi, tempat dan waktu yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di BPKAD Kota Palembang. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Kota Palembang (Studi Pada BPKAD Kota Palembang)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan penulis, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang?
4. Apakah sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dimaksud tentang sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi serta kualitas informasi laporan keuangan yang terjadi pada pemerintah Kota Palembang. Data/informasi berdasarkan kondisi di tahun 2022.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. **Manfaat Teoritis**

1. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, Penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan pengaruh sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah.
2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah.

b. **Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah Kota Palembang, hasil penelitian ini menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah.
2. Bagi Pembaca, dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.